Halaman

Pejabat Teras di Medan Diduga Terlibat

Dari Halaman 1

kredit tersebut diberikan.

"Satu agunan dijaminkan di dua bank berbeda, yaitu BRI dan Bank Sumut. Nah, keduaduanya cair. Dan di Bank Sumut ternyata kredit tersebut bermasalah dan mengindikasikan adanya manipulasi dokumen," ungkap sumber yang minta namanya tak dicantumkan.

Seperti diketahui, Z pernah bekerja sebagai pegawai di Bank Sumut Cabang Pembantu Krakatau, Medan selama 19 tahun (1997– 2016), dengan karir tertinggi sebagai Kepala KCP Krakatau. Kemudian ia mengundurkan diri pada tahun 2016.

Terpisah, Plh Kasipenkum Kejati Sumut Indra Hasibuan, menyatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

"Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Saat ini kami masih terus menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang lain,'

Terpisah, pejabat teras berinisial Z yang coba dikonfirmasi Mimbar Umum, hingga kini masih bungkam. Tak sepatah kata pun membalas pesan singkat yang dilayangkan kepadanya.

Eks Pejabat Kemenag Bungkam soal Kuota Haji

Dari Halaman 1

"Tanya penyidik saja," kata Subhan sembari meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/11).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik mendalami Subhan perihal pembagian kuota haji tambahan untuk pelaksanaan tahun 2024.

"Dalam pemeriksaan terhadap saksi Sdr SC hari ini, penyidik mendalami pengetahuannya terkait pembagian kuota haji 50:50, serta penyediaan layanan bagi jemaah haji," tutur Budi.

Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji

Kuota haji khusus terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus.

Lebihnya yakni 92 persen diperuntukkan untuk kuota haji reguler.

Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 seharusnya dibagikan untuk jemaah haji reguler sebanyak 18.400 atau setara dengan 92 persen,

dan kuota haji khusus sebanyak 1.600 atau setara dengan 8 persen.

Dengan demikian, seharusnya haji reguler yang semula hanya 203.320 akan bertambah menjadi 221.720 orang. Sementara haji khusus yang semula 17.680 akan bertambah menjadi

Namun, yang terjadi justru pembagiannya dibagi menjadi 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 15 Januari 2024.

KPK meyakini ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pembagian kuota haji tambahan tersebut. Hal itu juga diperkuat oleh pendapat ahli hukum.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ditaksir merugikan keuangan negara setidaknya Rp1 triliun. Namun, KPK masih menunggu perhitungan final kerugian negara yang sedang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, sejak awal penanganan perkara ini, KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang.

Sudah banyak saksi baik dari Kementerian Agama maupun biro perjalanan haji dan aso-

siasi yang dilakukan pemeriksaan. Beberapa di antaranya Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Staf Yaqut yakni Gus Alex; Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry.

Kemudian pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur; Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah; Pemilik travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru Ibnu Mas'ud; Sekretaris Kesthuri Muhammad Al Fatih; Divisi Visa Kesthuri Juahir; Ketua Sapuhi Syam Resfiadi; hingga Komisaris Independen PT Sucofindo Zainal Abidi.

Sementara itu, pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyhur.

KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Ditjen PHU

Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita. Seperti dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan

Kementerian Agama.

properti.(cnni/js)

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di BPKH

Dari Halaman 1

penyidikan. Dengan demikian, hal tersebut berbeda dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang sudah masuk tahap peny-

"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," kata Asep, Senin (10/11).

Jenderal polisi bintang satu ini bilang KPK mendapat informasi seputar dugaan korupsi pengumpulan tarif pengiriman barang jemaah haji. KPK bakal mengecek langsung fasilitas tempat tinggal, kategori hingga akomodasi

"Dan juga ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang, karena teman-teman, apa namanya, saudara-saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang ngirim barang dan lain-lain," tutur Asep.

"Nah, itu ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan, ini seperti

apa, kerja sama dengan siapa, apakah dengan PT Pos atau mungkin perusahaan swasta, ekspedisi swasta atau bagaimana? Nah, seperti itu, dan penggunaan dana itu," tambahnya.

Asep menduga terdapat perbedaan tarif transportasi dan pengiriman barang untuk

"Karena kan begini, jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu clue-nya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina, Padang Arafah di Mina, seberapa jauh dari sana, kan seperti itu. Makin dekat ke sana ke mari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal," ungkap dia.

Merespons upaya penyelidikan terkait layanan pendukung haji yang dilakukan KPK, BPKH menegaskan pihaknya menghormati serta mendukung penuh seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

Langkah KPK tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

BPKH menyatakan akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan sebagai lembaga publik yang taat hukum, BPKH selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada otoritas yang berwenang.

"BPKH memastikan kepada seluruh Jemaah Haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel. Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan," ujar Fadlull dalam keterangan tertulisnya.(cnni/js)

Polda Metro Panggil Roy Suryo Cs Hari Ini

Dari Halaman 1

Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan agar para tersangka memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus tuduhan ijazah palsu

"Kami berharap mudah-mudahan dari para tersangka bisa memenuhi panggilan kami sehingga hak yang bersangkutan sebagai warga negara untuk menyampaikan klarifikasinya dalam bentuk berita acara itu dipenuhi juga oleh yang bersangkutan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes

Iman Imanuddin saat konferensi pers di Jakarta,

Kepolisian menetapkan sebanyak delapan orang tersangka dalam kasus ini. Delapan tersangka dibagi ke dalam dua klaster, yakni klaster pertama adalah ES, KTR, MRF, RE, dan DHL, kemudian klaster kedua adalah RS, RHS, dan TT.

Iman mengungkapkan alasan penetapan delapan tersangka menjadi dua klaster dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masingmasing tersangka.

"Dalam hasil penyidikan kami yang diper-

oleh fakta dari hasil penyidikan tersebut tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masingmasing tersangka," jelasnya.

Kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin mengatakan pihaknya telah menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Ia memastikan kliennya akan hadir besok.

'Terkait pemanggilan kita akan memenuhi panggilan itu sebagai warga negara yang baik," kata Khozinudin saat dikonfirmasi, Senin (10/11).(cnni/js)

Bobby Angkat Bicara

Dari Halaman 1

panjang, Bobby menekankan pentingnya kejelasan dalam kasus ini. Bobby meminta aparat penegak hukum bergerak cepat menuntaskan penyelidikan.

"Kalau dibakar, mudah-mudahan segera ditangkap," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (12/11).

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Calvijn Simanjuntak mengungkapkan, hingga kini penyidik telah memeriksa 39 saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran yang melanda rumah pribadi hakim Khamozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah, Medan Selayang, pada Selasa (4/11/2025).

'Total sudah ada 39 saksi yang dimintai keterangan. Mereka terdiri dari saksi korban, petugas damkar, sekuriti, warga komplek, petugas dinas kebersihan P3SU, hingga kepala lingkungan," kata Calvijn di Medan.

Calvijn menjelaskan, penyidik kini tengah

memadukan hasil crime scene investigation dengan pemeriksaan laboratorium forensik dan identifikasi dari INAFIS. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

"Proses ini harus hati-hati. Kami menyusunnya secara deduktif ke induktif, mulai dari area luar komplek hingga ke dalam rumah," jelasnya.

Calvijn menyebut, sebagian kamera CCTV di area depan rumah tidak berfungsi, namun tim masih bisa memperoleh rekaman dari sejumlah titik di sekitar komplek.

"Beberapa CCTV sudah kami periksa. Walaupun ada yang rusak, kami juga mengambil rekaman dari lapisan luar komplek untuk dibandingkan dengan fakta lain di lapangan," ujarnya.

Saat ditanya apakah kebakaran itu disebabkan unsur kesengajaan atau murni kecelakaan, Calvijn belum mau berspekulasi. "Kami mohon waktu. Penyidik tidak ingin terburu-buru menyimpulkan sebelum semua fakta benar-benar cocok," tegasnya.

Diketahui, rumah yang terbakar itu milik Hakim Khamozaro Waruwu, Ketua Majelis Hakim dalam perkara korupsi proyek jalan di Sumut dengan terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), serta Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Na Mora

Kasus yang ditangani Khamozaro juga menyeret nama mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang dikenal dekat dengan Gubernur Bobby Nasution. Perkara tersebut merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam persidangan, hakim Khamozaro Waruwu sempat memerintahkan jaksa KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk menjadi saksi dalam persidangan. Sebab terungkap adanya pergeseran anggaran dari sejumlah dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR Pemprov Sumut yang dijadikan dasar anggaran pembangunan jalan.(cnni/js)

Bank Sumut dan Luka yang Tak Pernah Disembuhkan

Dari Halaman 1

up agunan, permainan internal. Seolah di bank ini, uang lebih dipercaya

daripada moral. Padahal, di atas kertas, Bank Sumut adalah kebanggaan daerah. Lembaga yang mestinya menopang ekonomi rakyat. Menjadi mitra petani, pedagang, nelayan, dan pengusaha kecil. Tapi bagaimana mungkin ia menjadi penopang, kalau sendi-sendinya sendiri goyah oleh kerakusan?

Di Medan, orang masih bertanya lirih, siapa yang sebenarnya mengawasi bank ini?

Apakah direksi masih paham arti amanah? Apakah komisaris masih membaca laporan dengan mata terbuka, atau hanya tanpa ber-

Rakyat boleh tidak tahu istilah "kredit macet" atau "SPI lemah". Tapi mereka tahu rasa kecewa. Mereka tahu arti kehilangan kepercayaan.

Sekali nasabah merasa dikhianati, tak ada bunga deposito yang cukup untuk menebus luka

Bank Sumut kini berdiri di persimpangan.

Antara berubah atau pelan-pelan ditinggalkan. Ke depan, reformasi bukan lagi soal mengganti pejabat, tapi membangun budaya jujur di dalam tubuhnya.

Integritas tidak bisa dicetak lewat pelatihan. Ia harus tumbuh dari nurani.

Dan nurani itu, barangkali sudah lama absen dari ruang rapat mereka.

Di ujung semua ini, kita hanya ingin satu hal sederhana: Bank daerah yang bisa dipercaya, bukan yang harus kita curigai setiap kali membuka berita pagi.(*)

Mentan Sidak

Dari Halaman 1

melakukan pengecekan terhadap distributor yang belum menurunkan harga. Kementan, kata dia, mencabut izin distributor tersebut.

"Kita sudah cabut izinnya, ya. Yang melanggar. Itu Di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, Sulawesi Selatan ada, Lampung ada. Sumatera Utara ada.

Pemerintah secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.(cnni/js)



Venezuela Siap

Dari Halaman 1

Menteri Pertahanan Venezuela Padrino Lopez mengatakan ratusan tentara dikerahkan dalam rangka latihan militer untuk bersiap melawan "ancaman" dari Washington.

"Nyaris 200.000 tentara telah dikerahkan di seluruh negeri untuk latihan ini," kata Padrino kepada stasiun televisi setempat, seperti dikutip Anadolu Agency.

Venezuela dan Amerika Serikat sedang bersitegang sejak beberapa waktu belakangan. Pergesekan kedua negara terjadi setelah Trump memerintahkan operasi antinarkoba yang menyasar kapal-kapal yang melintas di wilayah Karibia.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menentang keras tindakan tersebut lantaran menewaskan banyak orang. Maduro juga membantah negaranya terlibat dengan perdagangan narkoba seperti yang dituduhkan Trump. Maduro akhirnya memerintahkan militer menggelar

latihan dan mengerahkan prajurit, polisi, hingga milisi untuk menjaga kawasan pegunungan, pantai, sekolah, hingga rumah sakit.

Ia juga menyatakan siap mendeklarasikan keadaan darurat apabila AS meluncurkan serangan militer ke Pengerahan ratusan prajurit pada Selasa (11/11) sendiri

dilakukan bersamaan dengan diloloskannya rancangan undang-undang (RUU) oleh parlemen Venezuela. Majelis Nasional meloloskan beleid yang menetapkan "cara baru dalam menangani pengerahan" militer. (cnni/js)



totalitas: menyatukan kepercayaan, niat, dan tindakan dalam satu arah menuju Allah semata.

Dari Halaman 1

Namun dalam realitas kita, tauhid sering tereduksi menjadi simbol. Banyak pejabat fasih mengucap insya Allah di depan kamera, tapi tangannya ringan menandatangani proyek fiktif. Banyak birokrat rajin berdoa sebelum rapat, tapi menganggap dana publik sebagai milik pribadi. Di sinilah tragedi moral itu terjadi: kita bertuhan di bibir, tapi menafikan tauhid dalam perilaku.

Korupsi, dalam kacamata spiritual, adalah dosa kolektif. Ia tidak lahir dari individu yang rakus semata, tetapi dari sistem yang kehilangan kesadaran ilahi. Kita membangun birokrasi tanpa ruh amanah. Kita mendidik anakanak untuk pintar, tapi jarang mengajarkan takut kepada Allah. Kita beribadah ramai-ramai, tetapi membiarkan kemunafikan menjadi kebiasaan publik.

Al-Qur'an mengingatkan: "Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil." (QS. Al-Baqarah: 188). Ayat ini bukan hanya larangan hukum, tetapi peringatan eksistensial: jangan memperlakukan dunia seolah tanpa pengawasan Tuhan. Koruptor sesungguhnya bukan orang yang tidak tahu hukum, tapi orang yang kehilangan rasa diawasi.

Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi seharusnya tidak berhenti pada pidana penjara dan pembekuan aset. Ia harus dimulai dari rekonstruksi tauhid sosial menanamkan keyakinan bahwa kejujuran bukan strategi bertahan hidup, melainkan bentuk ibadah. Pendidikan antikorupsi seharusnya mengajarkan ketundukan, bukan sekadar kepatuhan. Karena manusia bisa patuh kepada aturan, tetapi belum tentu tunduk kepada Tuhan.

Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang bertauhid dalam makna sejatinya. Banyak pejabat yang lulusan luar negeri, tetapi hatinya kosong dari rasa takut kepada Allah. Banyak yang memimpin doa pembukaan rapat, tetapi lupa bahwa doa tidak akan menutupi ketidakjujuran.

Melawan korupsi bukan hanya urusan hukum, tetapi jihad spiritual. Jihad untuk menegakkan kembali keesaan Tuhan dalam sistem sosial dan pemerintahan. Jika tauhid hadir dalam diri pemimpin, ia akan adil.

Jika tauhid hadir dalam birokrasi, sistem akan bersih. Dan jika tauhid hadir dalam masyarakat, rakyat tidak akan menghalalkan segala cara untuk hidup layak.

Bangsa ini mungkin telah banyak berbicara tentang Tuhan, tapi terlalu sedikit yang hidup di bawah kesadarannya. Kita bertuhan, tapi sering mencurangi tauhid. Dan selama itu masih terjadi, setiap pembangunan akan berdiri di atas fondasi rapuh karena ia dibangun tanpa takut kepada Allah.